



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 12 TAHUN 1999**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN
KUALITAS SUMBER DAYA ALAM DAN PERMUKIMAN DESA DI
WILAYAH KECAMATAN**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1999 tentang Penyusunan Laporan Kualitas Sumber Daya Alam dan Permukiman Desa di Wilayah Kecamatan, perlu memberikan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3078);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3689);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Penyusunan laporan Kualitas Sumber Daya Alam dan Permukiman Desa di Wilayah Kecamatan;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada** : 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Se Indonesia.
2. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Se Indonesia.
- Untuk** :
- PERTAMA** : Melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1999 tentang Penyusunan Laporan Kualitas Sumber Daya Alam dan Permukiman Desa di Wilayah Kecamatan dengan berpedoman pada petunjuk sebagaimana yang tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA** : Membina, mengarahkan dan mengkoordinasikan dengan Dinas dan Instansi terkait di Daerah Penyusunan Laporan Kualitas Sumber Daya Alam dan Permukiman Desa di Wilayah Kecamatan.
- KETIGA** : Mengalokasikan dana dari APBD Tingkat I, APBD Tingkat II dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri secara berjenjang sesuai hirarki tingkat pemerintahan.

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 15 April 1999

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SYARWAN HAMID

TEMBUSAN:

1. Yth. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
2. Yth. Menteri Kesehatan;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Yth. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
5. Yth. Direktur Jenderal Anggaran;
6. Yth. Asmen III MNLH;
7. Yth. Kepala Badan Pusat Statistik;
8. Yth. Para Kepala Kantor PMD Propinsi Dati I se-Indonesia;
9. Yth. Kepala Kantor PMD Kabupaten/Kotamadya Dati II se-Indonesia.

LAMPIRAN : INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 12 TAHUN 1999
TANGGAL : 15 APRIL 1999

**PETUNJUK PENYUSUNAN
LAPORAN KUALITAS SUMBER DAYA ALAM DAN PERMUKIMAN
DESA DI WILAYAH KECAMATAN (LKSDA-PD WILCAM)**

1. UMUM

Rumusan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan memuat dua konsep pokok yaitu: **pertama** konsep kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup yang merupakan prioritas utama pembangunan nasional dan **kedua** gagasan keterbatasan yang bersumber pada keadaan teknologi dan organisasi sosial, yang diperlukan terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan. Jadi tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus diterjemahkan ke dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup, Pasal 1, ayat (1) menyatakan bahwa : lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Pengertian ini mencakup lingkungan hidup alami, lingkungan hidup buatan atau binaan dan lingkungan hidup sosial.

Implementasi Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup mewujudkan pengalaman bahwa lingkungan hidup pada dasarnya bertumpu pada tiga faktor utama, yaitu: kondisi sumber daya alam, kualitas lingkungan dan faktor kependudukan.

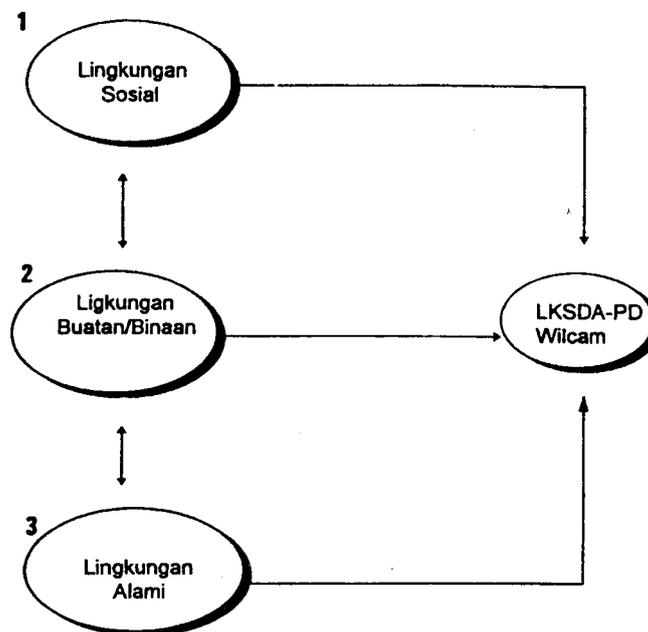
Dengan demikian perencanaan pembangunan yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan harus mempertimbangkan aktivitas ekonomi, keterbatasan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan. Pengelolaan

lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan.

II. TUJUAN PENYUSUNAN LKSDA-PO Wilcam.

- a. Memberikan gambaran yang seobyektif mungkin tentang dampak kegiatan manusia (sosial ekonomi), maupun pengaruh peristiwa alam terhadap komponen kependudukan dan lingkungan hidup dalam jangka waktu dua tahun.
- b. Memberikan informasi-informasi secara lengkap kepada masyarakat dan aparat pemerintah baik dalam bentuk ringkasan maupun dalam bentuk tabel. khususnya para pengambil keputusan dapat memahami dan menilai serta mengajukan usulan pencegahan dan atau (penanggulangan) terhadap dampak lingkungan negatif yang disebabkan oleh kegiatan manusia ataupun pengaruh peristiwa alami.

III. KOMPONEN LKSDA-PD Wilcam



IV. PENYUSUNAN LAPORAN KUALITAS SUMBER DAYA ALAM DAN PERMUKIMAN DESA DI WILAYAH KECAMATAN

A. Ruang Lingkup

Pada pokoknya ruang lingkup Juknis ini adalah cara menyusun/mengelompokkan dan menganalisis data dasar yang dipandang harus dikumpulkan secara langsung dari sumber data/produsen data. Pengelompokan data ini dilakukan berdasarkan atas pemikiran bahwa masalah kependudukan secara keseluruhan dapat diidentifikasi melalui unit-unit yang lebih kecil dalam masing-masing kelompok secara terpisah. Di lain pihak, LKSDA-PD di Wilayah Kecamatan diharapkan dapat menjadi penghubung atau jembatan antara berbagai komponen aktivitas pembangunan di kecamatan dengan menerapkan berbagai metode, baik langsung maupun tidak langsung.

Kemudian secara bertahap dapat dipelajari hubungan atau asosiasi berbagai indikator antar kelompok-kelompok sesuai dengan perencanaan pembangunan di kecamatan masing-masing, baik untuk melakukan evaluasi aktivitas pembangunan yang telah dan sedang berlangsung maupun untuk menunjang perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data secara umum dikenal ada 5 (lima) macam yaitu :

1. Metode Angket
2. Metode Wawancara
3. Metode Observasi
4. Metode Dokumentasi
5. Metode Tes/Ujian

Di dalam LKSDA-PD di Wilayah Kecamatan metode yang dianjurkan adalah **metode dokumentasi**, sehingga tim penyusun menjadi lebih mudah melakukan pengumpulan data, dan tidak perlu ke lapangan. Hal ini dilakukan karena membawa konsekuensi terhadap waktu, tenaga dan biaya. Dengan demikian pencatat administrasi

instansi kegiatan pembangunan menjadi termotivasi untuk menjadi lebih baik. Karena LKSDA-PD ini juga sangat berguna bagi kecamatan itu sendiri dalam mengukur sejauhmana keberhasilan pembangunannya dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

C. Indikator dan Cara Penghitungannya

Indikator yang dimaksud adalah lingkungan Sosial, **Lingkungan Buatan/Binaan dan Lingkungan Alam**. Ketiga kelompok di atas diuraikan juga konsep atau definisinya dan bila diperlukan akan disertakan juga cara penghitungan serta penjelasannya.

1. Lingkungan Sosial

Lingkungan Sosial adalah lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas manusia dengan manusia di sekelilingnya (masyarakat atau komunitas) yang dimaksudkan untuk dapat saling menguntungkan. Dalam aktivitas ini bisa saja terjadi gesekan, ketimpangan atau tekanan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, antara kelompok satu dengan kelompok lain. lingkungan sosial terdiri dari

a. Pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah nilai yang menunjukkan besaran relatif dari perubahan jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu dan dinyatakan dalam persen (%) pertahun, lihat tabel LS-1. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut :

$$r = \left(n \sqrt{\frac{pt}{po}} - 1 \right) \times 100 \text{ atau}$$

$$r = \left\{ \left(\frac{pt}{po} \right)^{1/n} - 1 \times 100 \right\} \times 100$$

dimana :

- r = pertumbuhan penduduk dalam persen
- Pt = jumlah penduduk tahun - t
- Po = jumlah penduduk tahun nol (tahun awal)
- n = selisih tahun t dengan tahun awal

b. Kepadatan penduduk

Indikator ini merupakan rasio dari jumlah penduduk di suatu daerah terhadap luas daerah tersebut dalam satuan km² (Ha), lihat juga tabel LS-1 - Secara matematis dirumuskan sebagai berikut :

$$KP = \frac{PM}{L}$$

dimana :

KP = kepadatan penduduk dalam satuan orang persatuan luas (km², Ha.).

PM = jumlah penduduk pertengahan tahun (penduduk pertengahan tahun = penduduk awal + penduduk akhir tahun dibagi dua).

L = Luas daerah (Km², Ha.).

Indikator ini secara relatif memperlihatkan padat atau renggangnya suatu daerah, yang berkorelasi dengan daya dukung lingkungan.

BAB : LINGKUNGAN SOSIAL

Tabel LS- 1 : PERTUMBUHAN DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT DESA/ KELURAHAN

Kecamatan :

Data Tahun :

No	Desa/Ke- lurahan	Luas (Km ²)	Tahun Sebe- lumnya (t-1)	Tahun sekarang (t)	Pertumbu- han	Kepadatan orang/Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
dst						

Sumber : Catatan Administrasi Kependudukan/Sensus Penduduk/
Poldes/Profil Desa

Keterangan :

c. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio = SR)

Indikator ini berguna untuk menunjukkan komposisi jumlah lelaki dan perempuan di suatu daerah. Karena bila jumlah salah satu

golongan lebih dari jumlah golongan yang lain secara relatif mempengaruhi kondisi psikososial di daerah tersebut. Selain itu juga menunjukkan potensi suatu daerah sekaligus permintaan seperti apa yang akan muncul dari daerah tersebut. Indikator ini ditunjukkan oleh perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan dalam satuan seratus *lihat Tabel LS-2*. Secara matematis dituliskan sebagai berikut :

$$SR = \frac{\sum \text{penduduk laki-laki}}{\sum \text{penduduk perempuan}} \times 100$$

d. Struktur Umur Penduduk

Indikator dari kondisi ini ditentukan oleh proporsi penduduk muda atau penduduk tua, dikatakan penduduk muda bila rasio ketergantungan arahnya lebih besar atau sama dengan 40 persen. Dikatakan penduduk muda apabila rasio ketergantungan anak lebih kecil dari 30 persen, atau rasio ketergantungan usia lanjut lebih besar atau sama dengan 10 persen, *lihat Tabel LS-2*. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Penduduk muda bila} \quad : \quad \left\{ DR_a = \frac{P0-14}{P15-64} \times 100 \right\} \geq 0,4$$

$$\text{Penduduk tua bila} \quad : \quad \left\{ DR_l = \frac{P0-14}{P15-64} \times 100 \right\} \leq 0,3 \text{ atau}$$

$$\left\{ DR_l = \frac{P65+}{P15-64} \times 100 \right\} \geq 0,1$$

dimana :

Dra = tingkat ketergantungan anak

DR = tingkat ketergantungan lanjut usia

P0 - 14 = jumlah penduduk usia muda

P65 + = jumlah penduduk usia lanjut

P15 - 64 = jumlah penduduk usia produktif

BAB : LINGKUNGAN SOSIAL
TABEL LS-2 : PENDUDUK MENURUT UMUR DAN JENIS KELAMIN
KECAMATAN :
DATA TAHUN :

No.	Umur	Tahun t - 1			Tahun t		
		L	P	RJK	L	P	RJK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	0 - 14						
2.	15 - 49						
3.	50 - 54						
4.	55 - 64						
5.	65 +						
Jumlah							
Tingkat ketergantungan usia anak = $\frac{P_{0-14}}{P_{15-64}} \times 100$ Tingkat ketergantungan usia lanjut = $\frac{P_{65+}}{P_{15-64}} \times 100$ % Perempuan usia subur = $\frac{P_{15-49}}{P_p} \times 100$ (Pp = Penduduk perempuan)							

Sumber : Catatan Administrasi Kependudukan / Sensus Penduduk/Poldes/Profil Desa

Keterangan :

e. Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Ratio = CBR)

Indikator ini memperlihatkan besarnya “masukan” dalam populasi penduduk yang disebabkan oleh banyaknya kelahiran hidup pada suatu waktu tertentu. Banyaknya jumlah kelahiran mencerminkan beberapa hal tertentu antara lain belum berhasilnya Keluarga Berencana (KB), masih banyaknya wanita menikah di bawah usia, merupakan kendala dari budaya daerah yang bersangkutan. Indikator ini dinyatakan dengan rasio jumlah kelahiran pada waktu tertentu (tahun) terhadap jumlah penduduk dalam satuan 1000. Secara matematis dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{CBR} = \frac{\text{Jumlah kelahiran hidup pada tahun } t \times 100}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}}$$

Perlu diingat bahwa rumusan ini baru bisa dilaksanakan bila administrasi kependudukan berjalan baik. Selama ini CBR dihitung secara tidak langsung dari sensus penduduk, *lihat tabel LS-3*.

BAB : LINGKUNGAN SOSIAL
TABEL LS-3 : PENDUDUK DAN ANGKA KELAHIRAN KASAR MENURUT DESA/KELURAHAN

KECAMATAN :

DATA TAHUN :

No.	Desa/Kel	Penduduk		Kelahiran		Angka Kelahiran Kasar	
		t - 1	t	t - 1	t	t - 1	t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst.							

Sumber : Catatan Administrasi Kependudukan

Catatan : t - 1 = tahun sebelum tahun data

t = tahun data

Keterangan :

f. Angka Kematian Kasar (Crude Death Ratio = CDR)

Indikator ini berkaitan dengan masalah kesehatan secara relatif, karena semakin baik kondisi kesehatan dan perilaku sehat sesuatu masyarakat, maka usia mereka semakin panjang dan jumlah kematian penduduk setiap tahun akan semakin kecil. Nilai indikator ini dinyatakan oleh rasio jumlah kematian pada suatu daerah (tahun) terhadap jumlah penduduk (pertengahan tahun), *lihat label LS-4*. Secara matematis indikator tersebut dirumuskan sebagai berikut :

$$CDR = \frac{\text{jumlah kematian pada tahun } t}{\text{jumlah penduduk pertengahan tahun}} \times 100$$

BAB : LINGKUNGAN SOSIAL
TABEL LS-4 : PENDUDUK DAN ANGKA KEMATIAN KASAR MENURUT DESA/KEL.
KECAMATAN :
DATA TAHUN :

No.	Desa/Kel	Penduduk		Kematian		Angka Kematian Kasar	
		t - 1	t	t - 1	t	t - 1	t
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2							
3							
4							
dst.							

Sumber : Catatan Administrasi Kependudukan
Catatan : t-1 - tahun sebelum tahun data
t - tahun data

Keterangan :

g. Angka Perpindahan Netto (Netto Moving Rasio = NMR)

Indikator ini menunjukkan banyak “masukan” dalam populasi penduduk dari segi perpindahan penduduk di suatu tempat. Semakin besar penduduk yang masuk atau semakin besar angka perpindahan penduduk netto, semakin besar beban yang harus dipikul oleh suatu daerah. Indikator ini dinyatakan sebagai perbandingan selisih penduduk yang datang dan pergi (pindah) di suatu daerah terhadap penduduk daerah tersebut, *lihat juga Tabel LS-5*. Secara matematis indikator tersebut dirumuskan sebagai berikut :

$$NMR = \frac{\sum \text{penduduk masuk / datang} - \sum \text{penduduk keluar / datang}}{\text{penduduk pertengahan tahun}} \times 100$$

BAB : LINGKUNGAN SOSIAL
TABEL LS-5 : PENDUDUK DAN ANGKA PERPINDAHAN
NETO MENURUT DESA/KELURAHAN
KECAMATAN :
DATA TAHUN :

No.	Desa Kelurahan	Penduduk	Datang	Pindah	Angka Perpindahan Netto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
dst.					
Jumlah					

Sumber : Catatan Administrasi Kependudukan
Keterangan :

h. Modus Lapangan Pekerjaan

Indikator ini menunjukkan lapangan pekerjaan apa yang paling banyak digeluti oleh penduduk di suatu daerah, bila mereka bekerja di daerah itu, maka indikator ini juga menunjukkan potensi ekonomi daerah tersebut secara relatif, lihat Tabel LS-6. Indikator ini ditunjukkan oleh lapangan pekerjaan yang paling banyak digeluti penduduk, biasanya dinyatakan dalam persen, bila yang diinginkan adalah ukuran kuantitatif atau menyebutkan/menuliskan lapangan pekerjaan yang mempunyai pekerja terbanyak di daerah tersebut (kualitatif).

BAB : LINGKUNGAN SOSIAL
TABEL LS-6 : MODUS PEKERJAAN PENDUDUK MENU-
RUT DESA / KELURAHAN
KETERANGAN :
DATA TAHUN :

No.	Desa/Kelurahan	Modus Pekerjaan	Jumlah	% Penduduk yang bekerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
dst.				
Jumlah				

Sumber : Catatan Administrasi Negara

Keterangan :

i. Persentase Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III plus

Indikator ini memperlihatkan tingkat pencapaian kesejahteraan suatu masyarakat, sebagai pengganti indikator penduduk perkapita yang relatif sukar dihitung. Indikator ini dinyatakan sebagai proporsi jumlah keluarga sejahtera III tambah keluarga sejahtera III plus terhadap jumlah seluruh keluarga dikali 100, lihat Tabel LS -7. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ KS III} + \text{KS III plus} = \frac{\text{KSIII} + \text{KSIII plus}}{\sum \text{keluarga}} \times 100$$

BAB : PERSENTASE KELUARGA SEJAHTERA III
ATAU III PLUS MENURUT DESA/ KEL.

TABEL LS-7 :

KECAMATAN :

DATA TAHUN :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah KK	Keluarga Sejahtera III dan III Plus	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
dst.				

Sumber : Petugas PLKB

Keterangan :

j. Persentase Pokmas/Keluarga yang Mendapatkan Bantuan IDT/PJPSPM

Indikator ini menunjukkan tingkat pencapaian program IDT dan secara relatif menunjukkan kinerja pengentasan kemiskinan. Indikator ini dinyatakan sebagai proporsi jumlah pokmas yang telah memperoleh bantuan IDT dengan pokmas yang seharusnya mendapat bantuan IDT, lihat Tabel 7a. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

% Pokmas/Keluarga IDT/PJPSPM =

$$\frac{\sum Pokmas / Keluarga IDT / PJPSPM}{\sum Pokmas} \times 100$$

BAB : LINGKUNGAN SOSIAL

TABEL LS-7a : PERSENTASE POKMAS/KELUARGA YANG MENDAPAT BANTUAN IDT/ PJPSPM

KECAMATAN :

DATA TAHUN :

No.	Desa/ Kelurahan	Jumlah KK	Pokmas/Keluarga yg mendapat IDTI/ PJPSPM	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
dst.				
Jumlah				

Sumber : Petugas PLKB

Keterangan :

Catatan : Dapat dibuat tabel yang sama untuk indikator bantuan PJPSPM

k. Modus Pendidikan Penduduk

Indikator ini memperlihatkan tingkat pendidikan tinggi yang mampu dicapai oleh kebanyakan penduduk di suatu daerah. Secara kuantitatif diperlihatkan oleh persentase penduduk terbesar pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Secara kualitatif cukup dituliskan

jenjang pendidikan yang terbanyak dicapai penduduk. *Lihat Tabel LS-8, Tabel LS-8a dan Tabel LS-9*

BAB : LINGKUNGAN SOSIAL
TABEL LS-8 : PENDUDUK KECAMATAN MENURUT
TINGKAT PENDIDIKAN TERTINGGI
KECAMATAN :
DATA TAHUN :

Pendidikan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
1. Tidak/belum tamat SD		
2. Pendidikan Dasar <ul style="list-style-type: none"> • SD/MI • SLTP/Tsanawiyah 		
3. Pendidikan Menengah (SMU/SMK)		
4. Pendidikan Tinggi <ul style="list-style-type: none"> • D1 - D3 • S1 - S3 		
Jumlah		

Sumber : Kantor Depdikbud Kecamatan
Keterangan :

BAB : LINGKUNGAN SOSIAL
TABEL LS-8a : MODUS PENDIDIKAN PENDUDUK PER
DESA / KELURAHAN
KECAMATAN :
DATA TAHUN :

No.	Desa/Kelurahan	Modus Pendidikan	% Modus Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
dst.			

Sumber : Kantor Depdikbud Kecamatan
Keterangan :

TABEL LS-9 : TINGKAT PARTISIPASI SEKOLAH (TPS)
 KECAMATAN :
 DATA TAHUN :

Pendidikan	Penduduk Usia Sekolah	Penduduk yang bersekolah	TPS (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendidikan Dasar • SD/MI (7-12) • SLTP (13-15)			
2. Pendidikan Menengah (SMU/SMK)			
3. Pendidikan Tinggi			

Sumber : Kantor Depdikbud Kecamatan

Keterangan :

1. Pertumbuhan Pendapatan Kecamatan

Indikator ini selain berlaku sebagai pengganti nilai produk domestik bruto yang relatif sukar dihitung, juga menunjukkan kemampuan ekonomis suatu daerah dan putaran roda perekonomiannya, lihat Tabel LS-10 dan LS-11. Akan lebih menarik bila dibandingkan dengan jumlah penduduk. Rumus indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$RPK = \frac{R_t - R_{t-1}}{R_{t-1}} \times 100$$

dimana :

RPK = pertumbuhan pendapatan kecamatan

R_t = pendapatan kecamatan tahun-t

R_{t-1} = pendapatan kecamatan tahun t-1

BAB : LINGKUNGAN SOSIAL

TABEL LS- 10 : KECAMATAN MENURUT SUMBER
 PENDAPATAN

KECAMATAN :

DATA TAHUN :

No	Sumber Pendapatan	Tahun t-1 dalam ribuan	Tahun t dalam ribuan	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
dst.				

Sumber : Kasi PMO

Keterangan :

BAB : LINGKUNGAN SOSIAL

TABEL LS-11 : PENDAPATAN ASLI DESA MENURUT DESA/KELURAHAN

KECAMATAN :

DATA TAHUN :

No	Desa /Kelurahan	Tahun t-1 dlm. Ribuan	Tahun t dlm. Ribuan	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
dst.				

Sumber : Kasi PMD

Keterangan :

2. Lingkungan Buatan / Binaan

Lingkungan buatan/binaan adalah lingkungan yang diciptakan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhannya, seperti fasilitas, permukiman, kampung, kota dan sebagainya. Berbagai indikator menunjukkan bahwa pembangunan lingkungan buatan seringkali merusak sumber daya alam dan mengancam lingkungan buatan itu sendiri, dan pada akhirnya mengancam manusia yang menghuni dan menggunakan lingkungan buatan atau binaan tersebut. Indikator yang termasuk kedalam lingkungan binaan atau buatan tersebut adalah :

a. Tingkat Pelayanan Fasilitas

Tingkat pelayanan fasilitas merupakan indikator yang menunjukkan sampai sejauh mana daya layan fasilitas yang ada yang memenuhi kebutuhan penduduk sekelilingnya. Di sini indikator dilihat dari dua hal, pertama adalah rasio jumlah fasilitas terhadap 1000 penduduk sebagai ukuran daya layan, kedua jarak rata-rata suatu fasilitas sebagai ukuran jangkauan pelayan, *lihat Tabel LB-1.*

1) Daya Layan Fasilitas Pendidikan

$$a) DL \text{ dik} = \frac{\sum \text{fasilitas pendidikan}}{\sum \text{penduduk tengah tahun}} \times 100$$

b) Jarak rata-rata fasilitas pendidikan

$$RL \text{ dik} = \sqrt{\frac{7 \times L}{44 \times F \text{ dik}}}$$

dimana : RL = Jumlah rata-rata fasilitas pendidikan
 L = Luas wilayah
 F diK = Jumlah fasilitas pendidikan

BAB : LINGKUNGAN BINAAN
 TABEL LB-1 : TINGKAT DAN RADIUS PELAYANAN
 PENDIDIKAN

KECAMATAN :
 DATA TAHUN :

No.	Desa/ke- lurahan	Luas (Ha)	Jumlah Pen- duduk Usia Sekolah	Jumlah Fasilitas Pendidikan		Tingkat Pelayanan		Radius Pelayanan	
				Pendas	Penmen	Pendas	Penmen	Pendas	Penmen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
dst.									

Sumber : Kantor Depdikbud Kecamatan
 Catatan : Pendas = Pendidikan Dasar, Penmen = Pendidikan Menengah
 Keterangan :

2) Daya Layan Fasilitas Kesehatan

$$a) DL_{tm} = \frac{\sum \text{tenaga medis}}{\sum \text{penduduk tengah tahun}} \times 100$$

dimana

DL_{tm} : Daya layan tenaga medis

$$b) DL_{fk} = \frac{\sum \text{fasilitas kesehatan}}{\sum \text{penduduk tengah tahun}} \times 100$$

dimana :

DL_{fk} = Daya layan fasilitas kesehatan

$$c) RL_{kes} = \sqrt{\frac{7 \times L}{44 \times F_{kes}}}$$

Lihat Tabel LB - 2

BAB : LINGKUNGAN BINAAN

TABEL LB-2 : TINGKAT DAN RADIUS FASILITAS KESEHATAN MENURUT DESA/ KELURAHAN

KECAMATAN :

DATA TAHUN :

No.	Desa/ke- lurahan	Luas (Ha)	Jumlah Pen- duduk	Jumlah Fasilitas Kesehatan		Tingkat Pelayanan		Radius Pelayanan	
				Fasilitas	TM	Fasilitas	TM	Fasilitas	TM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
dst.									

Sumber : Hasil Kesra Kecamatan, Kecamatan dalam Angka

Keterangan :

3) Daya Layan Fasilitas Perekonomian

$$a) DL_{fek} = \frac{\sum \text{fasilitas perekonomian}}{\sum \text{penduduk tengah tahun}} \times 1000$$

dimana

DL fek : Daya layan fasilitas perekonomian

$$b) RL_{fek} = \sqrt{\frac{7 \times L}{44 \times Fek}}$$

dimana :

RL fek = jarak rata-rata fasilitas perekonomian

lihat Tabel LB-3

BAB : LINGKUNGAN BINAAN
TABEL LB-3 : PELAYANAN FASILITAS EKONOMI
KECAMATAN :
DATA TAHUN :

No.	Fasilitas Ekonomi	Jumlah	Tingkat Pelayanan Per 10000 Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pasar		
2.	Toko/Warung		
3.	Koperasi		
4.	Bank		
5.	Dll		

Sumber : Catatan Pembangunan Kecamatan/Kasi Kesra

Keterangan :

4) Daya Layan Angkutan/Transportasi Umum

$$DL_{tr} = \frac{\sum \text{angkutan umum}}{\sum \text{penduduk tengah tahun}} \times 1000$$

dimana :

DLtr = adalah daya layan angkutan umum / transportasi

Lihat Tabel LB-2

Catatan :

- Fasilitas kesehatan terdiri dari rumah sakit, puskesmas, posyandu dan klinik KB
- Tenaga medis meliputi dokter, paramedis (perawat, bidan dan sebagainya)
- Fasilitas perekonomian meliputi pasar, toko/pertokoan dan koperasi,
- Fasilitas transportasi meliputi angkutan umum (kapal, mobil, motor dan lain-lain)
- Fasilitas pendidikan meliputi pendidikan dasar (SD/II)
- Fasilitas pendidikan meliputi pendidikan dasar (SD/Ibtidayah, SLTP), SMU/SMK, Akademi, Perguruan Tinggi/Universitas.

BAB : LINGKUNGAN BINAAN
TABEL LB-4 : PELAYANAN FASILITAS TRANSPORTASI
KECAMATAN :
DATA TAHUN :

Fasilitas Transpotrasi	Jumlah	Tingkat Pelayanan per 1000 penduduk
(1)	(2)	(3)
1. Tradisional 2. Angkutan Umum <ul style="list-style-type: none">• Motor Air• Bermotor Roda 4• Bermotor Roda 3• Tidak Bermotor		

Sumber : Catatan Administrasi Pembangunan Kecamatan

Keterangan :

b. Rasio Penduduk per Rumah

Indikator ini berguna untuk melihat secara kasar kepadatan orang pertempat hunian. Indikator yang lebih tajam adalah

kepadatan orang per lantai hunian. Indikator ini dinyatakan sebagai rasio jumlah penduduk terhadap jumlah rumah. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$PR = \frac{\sum \text{penduduk pertengahan tahun}}{\sum \text{rumah}}$$

Gunakan Tabel LB-5. Kolom 4 dibagi Kolom 3.

BAB : LINGKUNGAN BINAAN
TABEL LB-5 : JUMLAH RUMAH PENDUDUK MENURUT DESA/KELURAHAN
KECAMATAN :
DATA TAHUN :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Rumah	Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk per Rumah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
dst.				
Jumlah				

Sumber : Catatan Administrasi Kecamatan/Kasi PMD
Keterangan :

c. Modus Penggunaan Energi untuk Penerangan

Indikator ini disamping dapat melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah, secara relatif dapat juga menunjukkan daya eksploitasi terhadap sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh mayoritas penduduk/rumah tangga yang menggunakannya. Indikator ini secara kuantitatif dapat dilihat dari persentase rumah tangga / keluarga terbesar pengguna jenis sumber energi tertentu. Atau dari hasil observasi aparat kecamatan sudah dapat diidentifikasi sumber energi apa yang paling banyak digunakan masyarakat daerah tersebut, lihat Tabel LB-6.

BAB : LINGKUNGAN BINAAN
TABEL LB-6 : JUMLAH KEPALA KELUARGA PENGGUNA LISTRIK PER DESA

KECAMATAN :

DATA TAHUN :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah KK	KK Pengguna Listrik	% Pengguna Listrik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
dst.				
Jumlah				

Sumber : Kasi Kesra Kecamatan

Keterangan :

d. Modus Penggunaan Energi untuk Masak

Indikator ini mempunyai kegunaan yang sama dengan modus penggunaan untuk prasarana, sama-sama menunjukkan daya eksploitasi (relatif) dari suatu sumber daya energi di daerah tersebut. Cara menentukannya juga sama dengan melihat sumber mana yang paling banyak digunakan oleh penduduk, *lihat Tabel LB-7.*

BAB : LINGKUNGAN BINAAN
TABEL LB-7 : MODUS ENERGI YANG DIGUNAKAN UNTUK PENERANGAN DAN MASUK PER DESA

KECAMATAN :

DATA TAHUN :

No.	Desa/Kelurahan	Penerangan	Masak
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
dst.			

Sumber : Catatan Administrasi Kecamatan/Kasi PMD

Keterangan :

e. Persentase Pengeluaran untuk Pengelolaan Lingkungan

Indikator ini berguna untuk melihat seberapa jauh atau parahnya kondisi lingkungan hidup di suatu daerah. Indikator ini dinyatakan sebagai proporsi pengeluaran kecamatan untuk pengelolaan lingkungan hidup terhadap total pengeluaran kecamatan atau total seluruh pengeluaran desa bisa diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Desa atau APPKD), lihat Tabel LB-8. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

dimana :

\sum pengeluaran kecamatan = total pengeluaran seluruh desa dalam kecamatan EE = persentase pengeluaran pengelolaan lingkungan hidup.

BAB : LINGKUNGAN BINAAN
TABEL LB-8 : PENGELUARAN PEMBANGUNAN KECAMATAN
MENURUT JENIS PENGELUARAN
KECAMATAN :
DATA TAHUN :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah (000 Rp.)	Distribusi %
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
dst.			
Jumlah			

Sumber : Catatan Administrasi Kecamatan/Kasi PMD

Keterangan :

f. Pertumbuhan Luas Penghijauan

Indikator ini berguna untuk melihat pencapaian upaya penghijauan lahan di suatu daerah. Indikator ini ditunjukkan oleh rasio selisih kumulatif lahan yang dihijaukan hingga tahun berjalan dengan tahun sebelumnya terhadap luas kumulatif tahun sebelumnya dikali 100. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut :

diamana :

RJAM = Tingkat kecukupan jamban

Lihat Tabel LB-11

BAB : LINGKUNGAN BINAAN

TABEL LB 11 : KETERSEDIAAN JAMBAN MENURUT DESA/
KELURAHAN

KECAMATAN :

DATA TAHUN :

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah KK/RMT	Jamban	Rasio Jamban per 1000 penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
dst.				
Jumlah				

Sumber : Catatan Sanitarian

Keterangan :

j. Jumlah Industri

Indikator ini merupakan indikator tak langsung untuk mendeteksi beban pencemaran yang terjadi atau faktor penekan kondisi lingkungan. Semakin banyak industri semakin berat beban pencemaran di daerah tersebut semakin tertekan kondisi lingkungan hidup yang ada. Indikator ini dinyatakan dengan mengemukakan jumlah industri yang ada di wilayah tersebut yang dirinci menurut skala dan jenisnya, lihat Tabel LB- 12, LB-13, LB- 14, LB- 15.

BAB : LINGKUNGAN BINAAN

TABEL LB-12 : BANYAKNYA INDUSTRI MENURUT SKALANYA

KECAMATAN :

DATA TAHUN :

No.	Skala Industri	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	Besar	
2.	Menengah	
3.	Kecil	
4.	Rumah Tangga	
Jumlah		

Sumber : Kesra

Keterangan :

BAB : LINGKUNGAN BINAAN

TABEL LB-13 : BANYAKNYA INDUSTRI MENURUT JENISNYA

KECAMATAN :

DATA TAHUN :

No.	Nama Industri	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
Jumlah		

Sumber : Kesra

Keterangan :

BAB : LINGKUNGAN BINAAN

TABEL LB-14 : DAFTAR NAMA INDUSTRI MENURUT JENIS
DAN SKALANYA

KECAMATAN :

DATA TAHUN :

No.	Nama Industri	Jenis Industri	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
Jumlah			

Sumber : Kasi Pembangunan dan Perekonomian

Keterangan :

BAB : LINGKUNGAN BINAAN
 TABEL LB-15 : BEBAN LIMBAH PADAT YANG DIHASILKAN
 PER DESA

KECAMATAN :

DATA TAHUN :

Desa/Kelurahan	Penduduk	Faktor Penggali Limbah Padat kg/orang/ton	Beban Limbah Padat ton/tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Desa 1			
• Penghasilan rendah		150	
• Penghasilan menengah		250	
• Penghasilan tinggi		900	
Desa 2			
• Penghasilan rendah		150	
• Penghasilan menengah		250	
• Penghasilan Tinggi		900	
Dan seterusnya			

Sumber : Kasi PMD

Catatan : Pendapatan rendah { jumlah keluarga pra sejahtera + sejahtera I } x rata-rata ART }

Pendapatan menengah {(jumlah keluarga sejahtera II dan sejahtera III) x rata ART }

Pendapatan tinggi {(jumlah keluarga sejahtera III plus) x rata-rata ART } ART = Anggota Rumah Tangga

Keterangan :

k. Persentase KK/RMT yang mendapat Pelayanan Air Bersih

Indikator ini selain menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat juga memperlihatkan secara relatif tingkat kesehatan mereka. Semakin banyak KK/RMT yang mendapat pelayanan air bersih berarti tingkat kesehatan atau kesejahteraannya semakin baik, *lihat Tabel LB-16*. Indikator ini dinyatakan sebagai proporsi dari KK/RMT yang ada. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut :

$$PAB = \frac{\sum KK / RMT, yang, mendapat, pelayanan, air, bersih}{\sum KK / RMT, dalam, wilayah} \times 100$$

dimana :

PAB : Persentase KK/RMT yang mendapat pelayanan air bersih.
Yang termasuk air bersih adalah air yang bersumber dari leding, pompa air tanah, sumur terlindung dan mata air terlindung.

I. Modus Sumber Air Minum yang Digunakan

Indikator ini menunjukkan secara tidak langsung eksploitasi pemakaian sumber daya air yang ada. Semakin banyak sumber daya air tertentu digunakan oleh masyarakat membawa risiko terjadinya deplisi sumber daya air yang ada, cadangan bisa berkurang, tanah akan mudah longsor dan sebagainya. Indikator dinyatakan sebagai persentase terbesar dari KK/RMT yang menggunakan sumber daya air tertentu, lihat Tabel LB-16.

BAB : LINGKUNGAN BINAAN
TABEL LB-16 : DISTRIBUSI KELUARGA/RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR MINUM YANG DIGUNAKAN

KECAMATAN :
DATA TAHUN :

Sumber Air Minum	Jumlah Keluarga/Rumah Tangga	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)
<ul style="list-style-type: none"> • Leding • Sumber air laut • Sumur terlindung • Mata air terlindungi • Sumur tak terlindung • Mata air tak terlindungi • Sungai/Waduk/Danau • Air hujan • Dan lain-lain 		

Sumber :
Keterangan :

m. Luas Lahan Tanaman Bahan Makanan

Indikator ini memperlihatkan seberapa jauh luas lahan yang dipakai untuk tanaman bahan makanan di suatu daerah menurut jenis tanamannya. Secara tidak langsung luasnya lahan tanaman bahan makanan tertentu memperlihatkan potensi ekonomi daerah dan sekaligus kemungkinan berisiko terhadap pencemaran dan deplisi sumber daya alam. Indikator ini dinyatakan dengan besaran luas dari lahan tanaman tersebut. Indikator ini bila dibandingkan dengan produksi tanamannya akan diperoleh indikator tingkat produktivitas lahan menurut jenis tanaman. Sebaliknya bila dibandingkan dengan luas serangan hama dapat diketahui tingkat kerugian kegiatan tersebut, *lihat Tabel LB- 17*

BAB : LINGKUNGAN BINAAN
TABEL LB-17 : LUAS LAHAN TABAMA, PENGGUNA PUPUK
DAN PESTISIDA PER HEKTAR

KECAMATAN :

DATA TAHUN :

No.	Desa/Kelurahan	Luas Tabama	Pupuk per Hektar	Pestisida per Hektar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
dst.				

Sumber :

Keterangan :

n. Luas Lahan Tanaman Perkebunan

Indikator ini memperlihatkan seberapa luas lahan di daerah tersebut yang ditanami tanaman perkebunan. Seperti halnya indikator pada butir n, indikator ini juga mempunyai kegunaan yang sama dalam memperlihatkan potensi ekonomi suatu daerah secara tidak langsung dan dampaknya pada lingkungan. Semakin besar lahan dibuka untuk perkebunan bila tidak dibarengi dengan wawasan lingkungan, maka semakin besar pula kandungan risiko lingkungannya. Indikator ini juga dinyatakan dalam satuan luas dan bila dibagi dengan luas daerah, maka proporsi pemakaiannya dapat diketahui, *lihat Tabel LB- 18*.

BAB : BAB LINGKUNGAN BINAAN
TABEL LB-18 : LUAS LAHAN TANAMAN PERKEBUNAN PENGGUNA PUPUK DAN PESTISIDA PER HEKTAR

KECAMATAN :

DATA TAHUN :

No.	Desa/Kelurahan	Luas Tanaman	Pupuk per Hektar	Pestisida per Hektar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
dst.				

Sumber :

Keterangan :

o. Penggunaan Pestisida per Hektar

Indikator ini menunjukkan seberapa besar penggunaan pestisida pada suatu jenis tanaman tertentu. Semakin banyak pestisida digunakan semakin besar pula ancaman terhadap lingkungan. Pemakaian pestisida haruslah mentaati aturan pemakaiannya dan tidak boleh melampaui ambang batas yang ditolerir. Indikator ini dinyatakan dengan perbandingan jumlah pestisida yang digunakan terhadap luas tanaman dari tanaman yang bersangkutan. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut :

$$P_{\text{pest}} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Pestisida yang digunakan pada tanaman ke } i}{\sum_{i=1}^n \text{Luas tanaman jenis ke } i}$$

dimana :

P_{pest} = Penggunaan pestisida per hektar

p. Penggunaan Pupuk per Hektar

Indikator ini mempunyai kegunaan yang sama dengan butir p, yaitu menunjukkan risiko lingkungan, dalam hal ini lahan/tanah terhadap kelebihan penggunaan pupuk terutama pupuk kimia. Sebaliknya bila yang dihitung adalah pupuk kandang, maka yang diperlihatkan adalah tingkat daur ulang dari kotoran ternak. Atau pemanfaatan buangan sub-sektor

peternakan. Indikator ini dinyatakan sebagai perbandingan jumlah pupuk (kimia atau kandang) terhadap jumlah luas tanaman yang diamati. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut :

$$P_{\text{puk}} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Pupuk yang digunakan pada tanaman ke } - i}{\sum_{i=1}^n \text{Luas tanaman jenis ke } - i}$$

dimana :

P_{puk} = penggunaan pupuk (kandang/kimia) per hektar

Catatan :

Rumus ini dapat digunakan baik untuk pemakaian pupuk kimia maupun pupuk kandang atau kompos, lihat juga Tabel , LB 17 dan LB-18.

q. Jumlah Tangkapan Ikan

Indikator ini secara kasar menyiratkan eksploitasi sumber daya air dan produksi hasil perairan, baik di darat maupun di laut. Bila indikator ini dilihat secara spesifik, kemudian dibandingkan dengan baku mutu lingkungan tertentu (*maximum sustainable yield*), maka akan diketahui apakah usaha penangkapan yang selama ini dilakukan sudah berwawasan lingkungan atau belum. Indikator ini dinyatakan oleh satuan berat per satuan waktu (ton/tahun) dari jumlah tangkapan ikan di laut maupun di sungai dan danau atau lubuk, lihat Tabel LB-19.

BAB : LINGKUNGAN BINAAN

TABEL LB-19 : TANGKAPAN IKAN PER DESA/KELURAHAN

KECAMATAN :

DATA TAHUN :

No.	Desa/Kelurahan	Tahun t-1	Tahun t
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
dst.			

Sumber :

Keterangan :

r. Jumlah Ternak/ Unggas

Indikator ini disamping memperlihatkan potensi ekonomi peternakan juga sekaligus memberikan peringatan atau risikonya terhadap lingkungan yaitu berupa limbah ternaknya dan tersitanya lahan bagi kegiatan tersebut. Indikator ini dinyatakan dengan satuan jumlah persatuan waktu (ekor/ tahun) untuk setiap jenis ternak atau unggas yang dipelihara di daerah tersebut, lihat Tabel LB - 20.

BAB : LINGKUNGAN BINAAN
TABEL LB-20 : JUMLAH TERNAK UNGGAS PER DESA/
KELURAHAN
KECAMATAN :
DATA TAHUN :

No.	Desa/ Kelurahan	Ternak				Unggas			
		Sapi	Kuda	Kambing	dll.	Ayam	Itik	Angsa	dll.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Sumber :
Keterangan :

Lingkungan alami adalah lingkungan hidup yang berkaitan dengan masalah alam yang meliputi air, udara/atmosfir, tanah/lahan dan yang hidup di atasnya (flora dan fauna) serta berbagai aktifitas yang berkaitan dengannya.

3. Lingkungan Alami

a. Penggunaan Lahan

Indikator ini memperlihatkan sampai sejauh mana lahan yang ada di suatu daerah digunakan bagi kemakmuran masyarakat setempat dengan memperhatikan keseimbangan alam dan daya dukungnya. Proporsi yang serasi dari penggunaan lahan sangat menentukan keberlanjutan sumber

daya lahan yang ada. Indikator ini dinyatakan dengan persentase yang terdistribusi pada ragam penggunaan lahan yang ada, lihat Tabel LA-1, LB-2.

BAB : LINGKUNGAN ALAMI
 TABEL LA-1 : KONDISI DAN LATAR BELAKANG ALAM
 KECAMATAN : DATA :
 TAHUN :

No.	Rincian	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1.	Letak Kecamatan	
2.	Iklim a. Curah hujan rata-rata b. Suhu rata-rata c. Kelembaban rata-rata	
3.	Topografi/ketinggian	
4.	Jenis tanah pada umumnya	

Sumber : Catatan Administrasi Kecamatan

Keterangan :

BAB : LINGKUNGAN ALAMI
 TABEL LA-2 : LUAS LAHAN MENURUT PENGGUNAAN
 KECAMATAN :
 DATA TAHUN :

No.	Jenis Penggunaan	Tahun t-1	Tahun t
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Permukiman		
2.	Sarana dan Prasarana Ekonomi Pasar & Perkantoran		
3.	Fasilitas sosial, budaya dan umum (sekolah, peribadatan, Olah raga, kesenian, kesehatan, terminal)		
4.	Pertanian • Tanaman bahan makanan • Tanaman Perkebunan		
5.	Peternakan dan tambak		
6.	Lain-lain		

Sumber :

Keterangan :

b. Pertambangan dan Penggalian

Indikator ini disamping memperlihatkan potensi alam dari suatu daerah, juga dapat memberikan peringatan ancaman bila daerah yang mengandung barang tambang tersebut dieksploitasi tanpa dibarengi wawasan lingkungan indikator ini lebih berupa daftar lokasi dan jenis tambang dan penggalian yang ada di daerah tersebut, *lihat Tabel LA-3*

BAB : LINGKUNGAN ALAMI
TABEL LA-3 : LOKASI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
MENURUT JENISNYA
KECAMATAN :
DATA TAHUN :

No.	Jenis Tambang	Lokasi
(1)	(2)	(3)

Sumber : Catatan Administrasi Kecamatan/Kecamatan dalam Angka
Keterangan :

c. Frekuensi dan Jenis Bencana Alam

Indikator ini berguna untuk melihat apakah daerah tersebut rawan bencana alam atau tidak. lebih jauh lagi dapat dilihat jenis bencana alam macam apa yang sering terjadi di daerah tersebut. Indikator ini dinyatakan dengan bentuk jumlah frekuensi kejadian bencana alam menurut jenisnya dalam satu tahun di daerah tersebut, *lihat Tabel LA -4.*

BAB : LINGKUNGAN ALAMI
TABEL LA-4 : FREKUENSI BENCANA ALAM MENURUT
JENISNYA
KECAMATAN :
DATA TAHUN :

No.	Jenis Bencana Alam	Frekuensi selama dua tahun	Jumlah Penduduk yang terkena bencana
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Banjir		
2.	Tanah Longsor		
3.	Kekeringan		
4.	Gunung meletus		
5.	dan sebagainya		

Sumber : Catatan Administrasi Kecamatan/Kecamatan dalam Angka

Keterangan :

d. Cadangan Air

Menghitung cadangan air secara langsung termasuk pekerjaan yang sukar, sekalipun dilakukan di tingkat pusat. Karenanya, untuk itu perlu data dari berbagai variabel terkait untuk menghitungnya, seperti : curah hujan, kecepatan aliran, kedalaman dan luas penampang aliran air dan sebagainya, apalagi di tingkat kecamatan. Oleh karena itu sebagai pengganti secara tidak langsung cadangan air dapat dilihat dari banyaknya potensi air permukaan yang terdapat di suatu daerah. Indikator ini lebih merupakan daftar dari jumlah air permukaan yang ada seperti : mata air/lubuk/sungai dan danau/situ/empang/waduk yang ada di wilayah tersebut, lihat *Tabel LA-5, Tabel LA-6 dan Tabel LA 7.*

BAB : LINGKUNGAN ALAMI

TABEL LB-5 : DAFTAR NAMA SUNGAI YANG MELEWATI
KECAMATAN

KECAMATAN :

DATA TAHUN :

No.	Nama Sungai	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
dst		

Sumber : Dinas PU Kabupaten, Kecamatan dalam Angka

Keterangan :

BAB : LINGKUNGAN ALAMI
TABEL LB-6 : JUMLAH DAN LOKASI MATA AIR
KECAMATAN :
DATA TAHUN :

No.	Nama Sungai	Jumlah	Digunakan sebagai
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
dst.			

Sumber : Dinas PU Kabupaten, Kecamatan dalam Angka

Keterangan :

BAB : LINGKUNGAN ALAMI
TABEL LB-7 : DAFTAR NAMA DANAU, SITU, DAM,
WADUK,EMPANG MENURUT LOKASI

KECAMATAN :
DATA TAHUN :

No.	Nama Sungai	Lokasi	Digunakan sebagai
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
dst.			

Sumber : Dinas PU Kabupaten, Kecamatan dalam Angka

Keterangan :

c. Pantai

Bagi daerah yang memiliki pantai hal ini merupakan potensi alam yang tidak saja mempermudah akses untuk memperoleh sumber daya tetapi juga menjadi potensi bagi aktivitas ekonomi lainnya, seperti: tempat wisata. Semakin panjang garis pantai serta indah pemandangannya dan landai topografinya, semakin besar potensinya sebagai aset wisata. Sebaliknya bila kondisi tersebut dieksploitasi tanpa disertai wawasan lingkungan akan dapat mengancam habitat dan seisinya. Indikator ini dinyatakan dalam ukuran panjang dan kegunaannya, *lihat Tabel - LA 8.*

BAB : LINGKUNGAN ALAMI
TABEL LB-8 : NAMA PANTAI DAN KEGUNAANNYA
KECAMATAN :
DATA TAHUN :

No.	Nama Pantai	Kegunaannya	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
dst.			

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten, Catatan Administrasi Kecamatan

Keterangan :

f. Hutan Rakyat

Biasanya hutan yang dicatat menjadi bagian dari suatu wilayah administratif adalah hutan rakyat, di luar itu dianggap hutan negara. Dan hutan negara tidak dihitung sebagai bagian luas wilayah suatu daerah seperti kecamatan. Hutan rakyat ini selain berfungsi sebagai tempat masyarakat mencari nafkah, juga berfungsi sebagai penetralisir aliran atmosfer di daerah tersebut. Semakin luas hutan rakyat, semakin baik satuan luas dan persentasenya terhadap luas wilayah. Cantumkan jenis hutan yang ada dan jumlahnya serta penggunaannya, *lihat Tabel LA-9.*

BAB : LINGKUNGAN ALAMI
TABEL LB-9 : LUAS HUTAN RAKYAT DAN KEGUNAANNYA
KECAMATAN :
DATA TAHUN :

No.	Kegunaan	Luas (Ha)		Perubahan (Ha)
		Tahun t-1	Tahun t	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
dst				

Sumber : Catatan Administrasi Kecamatan/Kecamatan dalam Angka

Keterangan :

g. Flora dan Fauna

Selain hutan dan alam yang terlindung, isi alam tersebut juga merupakan indikator yang berarti guna melihat kondisi lingkungan. Tidak hanya keanekaragaman hayatinya belaka, tetapi juga potensinya dari sisi ekonomi. Namun bila isi alam yang berupa flora dan fauna tersebut dieksploitasi tanpa disertai wawasan lingkungan yang arif, maka akan banyak potensi yang hilang dan sumber daya ini termasuk yang lambat memperbaharui dirinya, bahkan ada yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable). Indikator ini lebih merupakan daftar hasil identifikasi dari jenis flora dan fauna yang ada di daerah tersebut. Sebaiknya dapat dituliskan nama latinnya, namun bila tidak nama lokalnya saja, lihat Tabel LA-10 dan Tabel LA-11.

BAB : LINGKUNGAN ALAMI
TABEL LB-10 : DAFTAR FLORA MENURUT JENISNYA
KECAMATAN :
DATA TAHUN :

No.	Kegunaan	Flora
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
dst.		

Sumber : Catatan Administrasi Kecamatan/Dinas Kehutanan Kabupaten/ Sub BKSDA

Keterangan :

BAB : LINGKUNGAN ALAMI
TABEL LB-11 : DAFTAR FAUNA MENURUT JENISNYA
KECAMATAN :
DATA TAHUN :

No.	Kegunaan	Fauna
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		

Sumber : Catatan Administrasi Kecamatan/Dinas Kehutanan Kabupaten/ Sub BKSDA

Keterangan :

D. Tanda/symbol Yang dipakai dalam penyajian

Jika seluruh data dalam sebuah tabel tidak tersedia, maka dalam laporan akhir, terutama data dalam disket, harus disertai dengan tabel kosong (blank table). Simbol-simbol yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Tanda data belum ada
- Tanda data tidak tersedia atau tidak berlaku -
- Data dapat diabaikan 0
- Tanda desimal ,
- Angka sementara x)
- Angka diperbaiki (direvisi) r)
- Angka perkiraan (estimasi) e)

Jika tersedia data menurut kecamatan, maka sajikanlah jumlah seluruh desa untuk menunjukkan data kecamatan.

E. Pengorganisasian Penyusunan LSDA-PD di Wilayah Kecamatan

1. Organisasi Penyusunan LKSDA-PD di Wilayah Kecamatan

a. Penanggungjawab

Penanggungjawab penyusunan LKSDA-PD di Wilayah Kecamatan adalah Camat. Camat selaku penanggungjawab mempunyai tugas :

- 1) Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan LKSDA-PD Wilcam di antara Kasubsi lingkungan Hidup (Pola Maksimal) dan Kasubsi Kesejahteraan Sosial dan lingkungan Hidup (Pola Minimal) Kantor PMD, Mantri Statistik dan Sanitarian yang meliputi aspek-aspek fungsional, formal, struktural dan operasional.
- 2) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyusunan LKSDA-PD Wilcam.

b. Pelaksana harian

Pelaksana Harian penyusunan laporan Kualitas lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan adalah Kepada Seksi Pembangunan Masyarakat

Desa pada Kantor Kecamatan setempat. Dalam pelaksanaannya sehari-hari bekerja sama dengan Mantri Statistik, Sanitarian dan Instansi terkait. Pelaksanaan harian mempunyai tugas

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan sosial ekonomi yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, upaya pengendalian dampak yang sudah dilakukan.
- 2) Mengumpulkan data dan informasi kependudukan dan lingkungan hidup
- 3) Mengolah dan menganalisis data dan informasi
- 4) Menyusun LKSDA-PD Wilcam
- 5) Menggandakan LKSDA-PD Wilcam

Untuk memperlancar penyusunan LKSDA-PD Wilcam perlu dibina sistem informasi terpadu di kecamatan dengan melibatkan instansi terkait. Pembinaan sistem informasi dapat dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi melalui pengisian formulir oleh sumber data atau Tim Penyusun LKSDA-PD Wilcam.

F. Sumber data

Data yang dipakai untuk menyusun LKSDA-PD Wilcam bersumber dari data yang dikumpulkan atau diterbitkan oleh :

1. Dinas dan instansi di kecamatan
2. Hasil survei atau penelitian, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta di kecamatan.

Kiranya perlu ditekankan bahwa data untuk penyusunan LKSDA-PD Wilcam merupakan data sekunder, yaitu data atau hasil analisis yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga/instansi. Dengan kata lain Tim LKSDA-PD Wilcam tidak melakukan pengumpulan data sendiri, sumber data yang penting antara lain berasal dari :

1. Lembaga/instansi Terkait

Data dapat diperoleh dari berbagai lembaga/instansi yang berkaitan dengan sektor tertentu, termasuk yang belum diterbitkan. Misalnya, data pendidikan dari instansi, data kesehatan dari instansi dan sebagainya.

2. Penelitian/studi kasus

Penelitian/studi kasus yang ada di Kecamatan, hasil penelitian mahasiswa KKN, dan lain-lain.

G. Pendataan

1. Proses kegiatan

a. Tahap pemantauan

Pada tahap ini dipantau semua aspek kependudukan dan lingkungan hidup, melalui pengumpulan data secara berkala sehingga tersusun suatu database kependudukan dan lingkungan hidup.

b. Tahap evaluasi

Evaluasi diarahkan pada tiga aspek :

- 1) Kegiatan sosial ekonomi yang menimbulkan dampak pada komponen kependudukan dan lingkungan hidup.
- 2) Upaya pengendalian dampak yang telah dilakukan, dan
- 3) Gambaran tentang kualitas kependudukan dan lingkungan hidup.

Terdapat tiga periode pengumpulan data dasar yang perlu dilakukan, yaitu : data tahunan, data untuk setiap lima tahun, dan data yang dikumpulkan sewaktu-waktu, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) data dasar dari masing-masing sektor (data sektoral) dikumpulkan setiap tahun, yang diperoleh dari masing-masing sektor;
- b) data dasar yang dikumpulkan untuk setiap lima tahun, baik yang dikumpulkan secara langsung maupun dari sumber lain, seperti: data penduduk berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus, Administrasi Pencatatan Kependudukan.
- c) data yang dikumpulkan sewaktu-waktu antara lain yang diperoleh dengan melakukan survei atau penelitian khusus, untuk menjawab permasalahan tertentu, yang dengan sendirinya juga akan menunjang perencanaan pembangunan selanjutnya.

2. Analisis Data

- a. Analisis berdasarkan sebuah tabel
- b. Analisis berdasarkan beberapa tabel

Analisis data yang dilakukan meliputi :

- 1) membuat tabulasi, dan
- 2) analisis lanjutan.

Pada dasarnya, analisis data dilakukan dengan dua macam tujuan, yaitu :

- a) Untuk mempelajari karakteristik antar kelompok, antar daerah atau antara titik waktu (*points in time*), yaitu perubahan dari waktu ke waktu.
- b) Asosiasi/hubungan atau korelasi antara variabel atau indikator yang relevan.

Untuk melakukan analisis yang lebih berdaya guna, termasuk analisis kebijakan, perlu memakai data tambahan yang tidak terdapat dalam Bagian 1, yang berasal dari berbagai sumber, termasuk :

- a. data LKSDA-PD Wilcam di Wilayah Kecamatan tahun-tahun sebelumnya.
- b. data LKSDA-PD Wilcam beberapa kecamatan tetangga
- c. data tambahan.

Data tambahan dimaksud adalah mencakup

- a. data dasar/latar belakang (geograpi, hidrologi, cuaca, dll)
- b. data yang tidak tersedia untuk seluruh kecamatan
- c. data yang sudah tersedia dari sumber-sumber lain

V. LAPORAN KUALITAS SUMBER DAYA ALAM DAN PERMUKIMAN DESA DI WILAYAH KECAMATAN

A. Penjelasan

Untuk mengidentifikasi besarnya permasalahan yang dihadapi dan kemajuan yang telah dicapai, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang, dan untuk mendukung pembangunan

berwawasan lingkungan diperlukan data kependudukan dan lingkungan hidup yang benar dan akurat. Berkaitan dengan hal tersebut, usaha untuk merekam dan menganalisis seluruh kegiatan yang mencakup aspek lingkungan dan kependudukan sangat penting artinya. Pendataan tahunan tentang kondisi kependudukan dan lingkungan-hidup kecamatan disertai keberhasilan itulah yang hendak dituangkan dalam LKSDA-PD di wilayah Kecamatan.

LKSDA-PD Wilcam ini memuat data dasar dan hasil berbagai analisis berdasarkan data dasar, termasuk hasil estimasi, sesuai dengan permasalahan kualitas lingkungan hidup di kecamatan masing-masing serta keberhasilan pembangunannya, dalam jangka waktu dua tahun. Atas dasar pemikiran ini, maka LKSDA-PD Wilcam akan diterbitkan secara berkala sekali dalam dua tahun, sehingga LKSDA-PD Wilcam dapat memberikan :

1. Masukan (input) bagi perencanaan baik pembangunan daerah maupun pembangunan nasional.
2. Data atau informasi untuk melakukan evaluasi tentang keberhasilan aktifitas pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan.

Pembangunan berwawasan lingkungan akan berhasil, bila peranserta masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan. Pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan-hidup, yaitu :

1. Merangsang peranserta masyarakat dalam pengembangan lingkungan melalui pembinaan kesadaran masyarakat. Ikhtiar berperan serta dapat terwujud melalui pengembangan lembaga swadaya masyarakat yang mencakup kelompok profesi, hobi dan minat.
2. Pengembangan lembaga daerah dan pusat studi di lingkungan
3. Pembinaan sarana informasi yang menunjang pengelolaan lingkungan
4. Pengembangan pendidikan dan ketrampilan dalam pengelolaan lingkungan
5. Pengembangan peraturan perundang-undangan.

B. Pemanfaatan Data LKSDA-PD Wilcam secara umum

1. LKSDA-PD Wilcam sebagai model
2. LKSDA-PD Wilcam sebagai penunjang perencanaan pembangunan

C. Bentuk buku LKSDA-PD Wilcam

Untuk mencapai keseragaman buku LKSDA-PD Wilcam, kertas yang digunakan adalah HVS 80 gram berukuran folio. Sampul buku diseragamkan berwarna hijau dengan judul berwarna hitam.

D. Penyajian LKSDA-PD Wilcam

LKSDA-PD Wilcam terdiri dari :

Uraian tentang sesuatu aspek hendaklah dilengkapi dengan sumber data, defenisi data, histogram, grafik dan peta yang bersumber dari data yang terdapat dalam buku, dengan menyebutkan sumber data/informasi. Hal ini akan membuat LKSDA-PD Wilcam menjadi lebih komunikatif dan mudah dibaca.

E. Waktu Penyusunan LKSDA-PD Witcam

Perencanaan mulai dari bulan Januari - Maret tahun t. Pengumpulan data dan informasi dari April sampai dengan November tahun t, penyusunan dan analisis data bulan Agustus tahun t sampai dengan Mei tahun t+ 1, penyempurnaan Draft 1 LKSDA-PD Wilcam dari Mei - Juli tahun t+ 1. Penggandaan dan penyampaian kepada yang berwenang dari Agustus - Desember tahun t + 1 - Data LKSDA-PD Wilcam yang akan disusun adalah data tahun kalender.

JADWAL PENYUSUNAN LKSDA-PD WILCAM

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan							
		Tahun t				Tahun t+1			
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	(2)	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Triwulan 5	Triwulan 6	Triwulan 7	Triwulan 8
1.	Pemantauan	xxxxx							
2.	Pengumpulan data		xxxxx	xxxxx					
3.	Penyusunan dan analisis data			xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx		
4.	penyempurnaan Draft 1 LKLK						xxxxx	xxxxx	
5.	Penggandaan & penyampaian LKLK kepada yang berwenang							xxxxx	Xxxxx

F. Sitematika

LKSDA-PD Wilcam terdiri dari 2 Bagian. Bagian I berisikan tabel-tabel dan Bagian II berisikan rangkuman deskriptif hasil analisis dari tabel-tabel pada Bagian I

1. Kata Pengantar

Pada kata pengantar diuraikan mengenai tanggapan dan tindak lanjut LKSDA-PD Wilcam ini, serta ditandatangani oleh Camat.

2. Daftar Isi

Pada pengantar diuraikan mengenai tanggapan dan tindak lanjut LKSDA-PD Wilcam ini, serta ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan.

3. Bagian I

Bagian I berisi Tabel Bab lingkungan Sosial, lingkungan Binaan/ Buatan dan lingkungan Alami.

4. Bagian II

a. Pendahuluan

Pendahuluan ini menguraikan alasan penyusunan Buku LKSDA-PD Wilcam ini, dan sedikit analisis terhadap data yang telah dikumpulkan.

b. Permasalahan

Permasalahan yang dimaksud adalah permasalahan lingkungan hidup di kecamatan yang bersangkutan.

c. Dasar Hukum

Dasar hukum adalah dasar hukum yang mendukung penyusunan Buku LKSDA-PD Wilcam.

5. Tujuan laporan

Tujuan laporan sebaiknya dipisah menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat makro dan tujuan khusus bersifat Mikro (mengenai kecamatan yang bersangkutan).

6. Analisis

Analisis yang dimaksud adalah analisis berdasarkan data dalam tabel yang telah dikumpulkan yaitu mengenai :

Bab lingkungan sosial

Bab lingkungan binaan/buatan

Bab lingkungan alam

Masing-masing bab disajikan dalam bentuk narasi kualitatif dan kuantitatif.

7. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

b. Saran

8. Penutup

9. Lampiran

a. Data-data lain

b. Peta Kecamatan

c. Peta sebaran daerah-daerah industri

d. dan lain-lain

VI. PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan ini dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan Kualitas Sumber Daya Alam dan Permukiman Desa di Wilayah Kecamatan.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SYARWAN HAMID